

Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) (Studi pada Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang)

Wahyu Tri Mulyo, Heru Ribawanto, Mochammad Rozikin

Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang

Email: wahyu_trimulyo@gmail.com

Abstract

Integrated area is a region where the centralization of the public services. One area that can be taken as an example of the integrated area development is Lumajang. Lumajang located in East Java Province is geographically has a very potential. Integrated area known as Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Lumajang built since 2001 was apparently deviated from its original planning. Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) now just a complex of modern buildings that is less serves as a tourist center and Lumajang economic. Results from the study showed that the implementation of development policy Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) in Lumajang, still not going as planned. The results of this study discuss several aspects. The first aspect is the implementation of development policy Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) in Lumajang. Another aspect is the impact of development policy Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) in Lumajang.

Keywords : Development, Implementation of Public Policy, Integrated Area

Abstrak

Kawasan terpadu merupakan suatu kawasan tempat pemusatan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu daerah yang dapat diambil sebagai contoh adanya pembangunan kawasan terpadu adalah Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang yang terletak di Propinsi Jawa Timur memang secara geografis memiliki wilayah yang sangat potensial. Namun pada kenyataannya saat ini, Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Lumajang yang dibangun sejak 2001 itu ternyata melenceng dari tujuan awalnya. Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) hanya menjadi komplek gedung modern yang kurang berfungsi sebagai pusat wisata dan ekonomi

Lumajang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) di Kabupaten Lumajang, masih kurang berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Hasil penelitian ini membahas beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah implementasi kebijakan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) di Kabupaten Lumajang. Kedua, mengenai bagaimana dampak dari kebijakan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) di Kabupaten Lumajang.

Kata Kunci: Pembangunan, Implementasi Kebijakan Publik, Kawasan Terpadu

Pendahuluan

Pembangunan dalam perspektif luas dapat dipandang sebagai suatu proses multi-dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro, h.1998).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, maka perlu ditingkatkan kemampuan serta kemandirian untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah keterlibatan masyarakat secara utuh dalam semua proses pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting mengingat masyarakatlah yang memiliki informasi mengenai kondisi dan kebutuhannya. Selain itu, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dan tumbuhnya rasa memiliki yang tinggi untuk ikut mengawasi jalannya suatu pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya.

Termasuk di dalamnya adalah mengenai pengurusan potensi daerah, mengingat setiap daerah tentu memiliki potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Untuk itu, sebagai salah satu konsekuensi desentralisasi dan otonomi daerah, masing-masing daerah harus semakin jeli dalam mengelola setiap potensi yang dimiliki daerahnya.

Sebagai upaya dalam menterpadukan program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan dalam pembangunan wilayah.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan kawasan strategis kabupaten atau kota. Kawasan strategis kabupaten atau kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten atau kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.

Kawasan strategis pengembangan kawasan ekonomi di Kabupaten Lumajang diarahkan pada Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT). Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang.

Pada awal berdirinya Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Kabupaten Lumajang bertujuan sebagai perwujudan Tri Program plus khususnya pertanian, pariwisata dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tri Program plus itu sendiri merupakan salah satu program kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sehingga mendapat dukungan penuh dari DPRD, untuk menciptakan dan mewujudkan impian masyarakat,

Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah untuk mewadahi atau membuat ajang bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Lumajang untuk memamerkan produk-produk unggulannya. Untuk lebih memberikan nilai tambah pada segala potensi yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyiapkan sarana dan prasaran penunjang. Upaya ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi daerah.

Namun pada kenyataannya saat ini, Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Lumajang yang dibangun sejak 2001 itu diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp. 18.000.000.000 ternyata melenceng dari tujuan awalnya. Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) hanya menjadi komplek gedung modern yang kurang berfungsi sebagai pusat wisata dan ekonomi Lumajang. Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) belum memberikan manfaat yang besar kepada Lumajang dan masyarakatnya. Sedangkan sebagai tempat wisata, sampai sekarang belum terasa denyut kunjungan wisatanya.

KajianPustaka

Istilah *policy* di Indonesia sendiri dapat diartikan menjadi Kebijakan ataupun Kebijaksanaan. Dua istilah ini sering digunakan bergantian ataupun biasanya penulis memilih salah satu dari istilah tersebut. Dalam Islamy (2007, h.15) Harold

D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijaksanaan sebagai *a projected program of goals, value and practices* (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah).

James E. Anderson, dalam Abdul Wahab (2008:2) merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Carl J. Frederick mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut "kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah padatujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan" (Abdul Wahab, 2008, h.3).

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan Grindle dalam Abdul Wahab (1991, h.45). Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan Jenkins dalam Parson (2011, h.463). Implementasi merupakan tahap atau aksi dimana semua perencanaan yang dirumuskan menjadi kebijakan yang di operasionalkan. Suatu kebijaksanaan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat (Islamy, 2007, h.107). Selanjutnya dalam memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang selanjutnya terjadi sesudah sesuatu program yang dilaksanakan atau dirumuskan. Implementasi membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi *top-down* dan sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. Implementasi adalah proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan implementasi, atau melaksanakan dari atas.

Suatu hal yang penting dalam pembuatan kebijakan adalah sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan. Suatu kebijakan tidaklah menjadi kebijakan yang dapat dirasakan manfaat atau akibatnya jikalau tidak diimplementasikan secara baik.

Disini penulis mencoba mencermati dan melihat sejauh mana implementasi pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT). Maka dari berbagai macam bentuk model implementasi kebijakan dari berbagai pakar diatas dipilihlah model yang sekiranya cocok dengan penelitian implementasi kebijakan mengenai pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT). Kita mengetahui bahwasannya dibutuhkan kerjasama yang rapi dalam mengimplementasikan kebijakan implementasi pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) dari tahap proses penggunaan, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi peneliti mencoba untuk mengambil salah satu model di atas yaitu milik Van Meter Van Horn dengan menguji proses implementasi pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) menggunakan dasar beberapa point sebagai berikut:

1. Standart dan Sasaran
Merupakan standart yang menjadi target capaian dan sasaran yang menjadi tujuan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT).
2. Kemampuan Sumber Daya
Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung pelaksanaan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT), khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) secara efektif. Kemudian berkenaan pula dengan kesediaan dari para implementator untuk peduli kebijakan tersebut. Kecakapan tidaklah mencukupi tanpa kesediaan untuk melaksanakan kebijakan.
3. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik dalam upaya untuk mensukseskan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT)

4. Karakteristik agen pelaksana
Berkenaan dengan sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan yang dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya
5. Kondisi ekonomi dan sosial
Lingkungan terdiri dari aspek ekonomi dan sosial lokasi dan pihak implementator Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT)
6. Sikap para pelaksana
Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT)

Kata kawasan adalah kata yang diadopsi dari bahasa lain, menurut bahasa Inggris kata kawasan lebih tepat dipinjam dari kata "Area" yang berarti "*Scope or range of activity*" yang terjemahan bebasnya adalah "daerah yang dipakai untuk suatu kegiatan" (Hartono, 2007, h.34). Sedangkan kawasan menurut kamus bahasa Indonesia (Amran, 2002:135) adalah "Daerah" sedangkan daerah berarti wilayah. Dengan demikian kawasan menurut pemahaman umum adalah sebuah kawasan yang diperuntukkan bagi suatu kepentingan tertentu.

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan atau lingkungan.

Metode Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat

ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik. Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Hasil dan Pembahasan

Secara geografis Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang sangat potensial, mengingat terletak pada jalur distribusi perekonomian Jawa Timur yang sangat strategis, sebagai jalur penghubung Propinsi Jawa Timur dengan Propinsi Bali. Kondisi yang demikian, kiranya tidak dapat ditawar lagi, bahwa prinsip kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Lumajang tetap mengarah pada pengembangan wilayah bagian utara Lumajang.

Berdasarkan tata ruang pengembangan wilayah sekaligus seiring dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi, incaran titik pusat pengembangan wilayah diarahkan pada Kawasan Wonorejo. Hal ini tidaklah berlebihan, bahwa pada kawasan inilah merupakan titik temu jalur Probolinggo - Jember dan Malang - Probolinggo - Jember serta sebaliknya. Atas dasar realitas inilah, Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan dukungan penuh DPRD, sepakat untuk menciptakan dan mewujudkan impian masyarakat Lumajang, yang selama ini Lumajang dikenal sebagai Kota Pisang lebih dijuluki sebagai Kota Kantong.

Menangkap aspirasi yang demikian kuat, maka sejak tahun anggaran 2001 Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mencanangkan Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Pengembangan Andalan sekaligus Pusat Kota Lumajang II, yang ditandai dengan pembangunan Kawasan Wonorejo

Terpadu, atau lebih dikenal dengan istilah KWT.

Access road yang lebih baik (kelas jalan lebih tinggi) dibandingkan dengan wilayah Lumajang bagian Selatan sangat berpengaruh terhadap kemudahan perkembangan kota. Terlebih pada wilayah ini merupakan akses utama ke Probolinggo dan Jember. Disamping itu, wilayah Lumajang bagian Utara merupakan daerah yang memiliki elevasi yang lebih tinggi dari wilayah kota dan irigasi belum mengalami kemajuan sehingga sektor pertanian kurang berkembang. Dengan demikian wilayah Lumajang bagian Utara lebih tepat difungsikan sebagai pusat perkotaan baru.

Upaya penanggulangan konsentrasi aktivitas penduduk yang sementara ini berada pada perdagangan yang cukup tinggi di daerah Jalan Panglima Sudirman, yang tidak jarang berakibat *Spot Conflict* pada kawasan tersebut. Penggeseran Central Bisnis Distrik (CBD) ke arah utara, diharapkan dapat mengurangi *Spot Conflict* daerah kota/padat penduduk. Pergeseran tingkat pelayanan transportasi dari wilayah pusat kota ke wilayah utara kota, telah diawali dengan perpindahan terminal lama di Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang ke Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Tahun 1992.

Terakhir, secara legal pada tahun 2000 telah disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Lumajang pada BWK F, dimana pada wilayah ini direncanakan Kawasan Wonorejo Terpadu sebagai kawasan "*Public Service*". Untuk yang pertama pada kawasan ini telah dibangun Gedung DPRD, dan kondisi ini semakin menambah semaraknya perkembangan kawasan Wonorejo.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu di Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembangunan KWT kurang berhasil karena tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Disini akan dianalisis setiap poin yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT).

a. RegulasidanSasaran

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974).

Regulasi dan sasaran telah ditetapkan sejak awal, namun dalam pelaksanaannya ada yang tidak tercapai dan ada juga yang tercapai. Karena memang seperti teori Van Meter dan Van Horn diatas bahwasanya implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Dalam kasus ini, hal ini dapat terjadi karena pergantian kepala daerah, sehingga komitmen dalam pencapaian tujuan program menjadi sedikit berkurang. Seperti dalam program yang ditetapkan sejak awal yaitu tri program plus, disini pemerintah berusaha mewujudkan suatu kawasan yang multi fungsi yang terdiri dari pertanian yang berupa Kantor Dinas Pertanian yang disertai tempat diklat pelatihan pertanian, kebun serta *green house* sebagai tempat praktek. Namun pada kenyataan hal ini tidak berjalan karena kebun serta *green house* yang ada telah beralih fungsi, hal ini juga dikarenakan masyarakat sekitar yang kurang berpartisipasi dalam menjaga kebun dengan menjarah hasil kebun di areal KWT. Untuk sektor pariwisata pemerintah Kabupaten Lumajang masih dapat menjalankan sampai saat ini, dengan melihat masih banyaknya pengunjung yang datang untuk berekreasi, baik mengunjungi *Waterpark*, *bumpercar*, maupun *monorail*.

Sementara untuk sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), tidak jauh beda

dengan sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya UKM yang menempati areal Kawasan Wonorejo Terpadu. Disisi lain warga masyarakat berharap sangat besar sektor ini dapat tumbuh kembang, baik sebagai sentra oleh-oleh atau produk unggulan dari Kabupaten Lumajang, dan juga bisa juga dibangun suatu museum seni yang nantinya dapat menampilkan hasil kesenian khas Kabupaten Lumajang yang berkembang sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat.

b. Aktor Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Guna menjamin kualitas pelaksanaan tugas secara optimal maka perlu penambahan personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditempatkan di obyek-obyek wisata serta pembagian tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Disamping itu kualitas aparatur juga perlu mendapatkan porsim melalui ijin belajar maupun tugas belajar bagi pegawai yang mempunyai potensi. Mengingat masih kurangnya pegawai yang berpendidikan lebih tinggi, karena bisa jadi kedepannya masih banyak tugas penting guna pengembangan KWT secara khusus maupun pariwisata Kabupaten Lumajang secara umum.

c. Anggaran

Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk

memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1974).

Sementara pada kasus pembangunan KWT yang penulisteleti, dari segi anggaran diketahui sudah mencukupi guna perawatan bangunan yang adapada KWT, juga ditambah dukungan yang penuh dari DPRD Kabupaten Lumajang.

Namundari hasil pengamatan masih dapat dinilai kurang guna pengembangan, karena tidak adanya inovasi yang sangat mencolok. Hal ini dapat disebabkan kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikurcikan dan dapat dari hasil pengunjng yang berwisata.

d. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Fasilitas yang ada di areal KWT sudah cukup lengkap, karena memang dalam pembangunannya telah direncanakan dengan matang. Namun saat ini banyak sarana dan prasarana yang berupa bangunan belum digunakan secara optimal, juga lebih cenderung terbengkalai. Untuk itu ada sebagian bangunan yang dialih fungsikan untuk aktivitas pemerintahan lainnya. Dari hasil pengumpulan data, ada wacana untuk pengembangan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) dengan mefungsikan bangunan yang ada sesuai dengan semestinya dan juga pengembangannya lebih lanjut.

e. Dampak Ekonomi

Setelah dibangunnya KWT, akan mempercepat berkembangnya kawasan Lumajang bagian utara pada khususnya. Dengan cepatnya perkembangan tersebut, maka akan banyak terbukanya kesempatan kerja dan berusaha baik skala besar maupun skala kecil. Sehingga dengan demikian secara otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan terutama bagi masyarakat Wonorejo dan sekitarnya, juga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, disamping meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juga dapat dilihat harga tanah yang meningkat nilai jualnya, dengan begitu dapat dinilai bahwasanya masyarakat Kabupaten Lumajang mulai melirik daerah Wonorejo sebagai daerah permukiman, investasi dan perdagangan. Dari semakin banyaknya pembukaan usaha di daerah sekitar KWT hal ini juga nantinya akan mewujudkan tujuan pembangunan KWT yang berupa penggeseran Central Bisnis Distrik (CBD). Dengan demikian, dibangunnya KWT telah memberi dampak ekonomi baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

f. Dampak Sosial dan Budaya

Pariwisata merupakan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga memberikan pengaruh terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata mempunyai energi pendobrak yang kuat dan mampu membuat

masyarakat setempat mengalami perubahan, baik ke arah perbaikan maupun ke arah penurunan (degradasi) dalam berbagai aspek.

Dampak sosial budaya muncul karena industri pariwisata melibatkan tiga hal, yaitu wisatawan, masyarakat setempat, dan hubungan wisatawan dan masyarakat. Dampak sosial budaya muncul apabila terjadi interaksi antara wisatawan dan masyarakat ketika (1) wisatawan membutuhkan produk dan membelinya dari masyarakat disertai tuntutan-tuntutan sesuai dengan keinginannya, (2) pariwisata membawa hubungan yang informal dan pengusaha pariwisata mengubah sikap spontanitas masyarakat menjadi transaksi komersial, dan (3) wisatawan dan masyarakat bertatap muka dan bertukar informasi atau ide, menyebabkan munculnya ide-ide baru.

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) saat ini lebih dipergunakan untuk sektor pariwisata karena sektor-sektor lain yang telah terhenti, sementara dari dampak yang ditimbulkan dari segi sosial budaya masyarakat tidak dapat secara cepat terlihat, karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi seketika, tetapi melalui proses. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa dampak yang timbul dari pembangunan KWT terhadap sosial budaya masyarakat cenderung bersifat positif yang lebih banyak mendatangkan keuntungan, seperti kecenderungan masyarakat untuk bermukim di daerah Wonorejo sehingga membuat daerah Wonorejo menjadi lebih ramai, sehingga pembangunan fasilitas sosial semakin lengkap guna menunjang hal tersebut.

Kesimpulan

Dengan melihat implementasi pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu di Kabupaten Lumajang yang terdiri dari regulasi, aktor pelaksana, anggaran, sarana dan prasarana, serta dampak yang dihasilkan yang berupa dampak ekonomi, sosial dan budaya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan regulasi dan sasaran yang telah dibuat oleh Kabupaten Lumajang

- dalam pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT), dari segi program yang berupa Tri Program Plus banyak menuai kendala yang seperti tidak berjalannya fungsi pertanian dan Usaha Kecil Menengah yang merupakan termasuk dari Tri Program Plus yang dicanangkan
2. Aktor pelaksana yang menangani Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) saat ini adalah Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya masih kekurangan jumlah pegawai yang memadai guna mengurus Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) bahkan sangat kurang apabila guna menangani pariwisata Kabupaten Lumajang secara keseluruhan. Baik dari jumlah maupun pendidikan yang memadai guna meningkatkan kualitas *output* yang dihasilkan.
 3. Anggaran yang dialokasikan didukung penuh oleh DPRD, dengan demikian Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya harus terus berinovasi guna pengembangan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) kedepan yang lebih baik dan bermanfaat.
 4. Sarana dan Prasarana sangat mencukupi dari sisi bangunan yang telah ada, namun masih kurang dalam pemanfaatannya.
 5. Dampak ekonomi yang timbul dari dibangunnya Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) terhadap masyarakat sekitar telah berkembang pesat, hal ini terlihat dari harga jual tanah atau NJOP yang meningkat, serta semakin maraknya perdagangan yang dilakukan masyarakat sekitar, juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) khususnya Waterpark.
 6. Dampak Sosial Budaya, pola masyarakat yang mulai melirik daerah Wonorejo sebagai tempat bermukim menjadikan Wonorejo semakin ramai yang memberikan dampak pula semakin lengkapnya fasilitas sosial yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang guna menunjang hal tersebut.

DaftarPustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (1991). **Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- _____. (2008). **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Malang, UMM Press.
- Amran, YS Chaniago. **Kamus Bahasa Indonesia Cetakan ke V**. Bandung, Pustaka setia.
- Bappeda Kabupaten Lumajang. (2002). **Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT)**. Bappeda Lumajang, Lumajang
- _____. (2008). **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang 2008-2028**. Lumajang, Bappeda Kabupaten Lumajang
- Hartono. (2007). **Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Industri Candi di Kota Semarang)**. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Islamy, M. Irfan. (2007). **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Bumi Aksara, Jakarta.
- KabarBisnis. (2009). **Telan Rp18 miliar, KWT takbermanfaatekonomis**, [Internet]. Available from: <<http://www.kabarbisnis.com/read/282331>>. [Accessed 06 Februari 2012].
- Parsons, Wayne. (2011). **Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan**. Jakarta, Kencana
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2004). **Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**. Jakarta.
- Todaro, Michael P. (1998). **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Terjemahan, Edisi Keenam**. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1974. *The policy implementation process : A conceptual framework*. **Administration and Society**. February.